



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS



RANCANGAN AKHIR

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2024

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	2
C. Maksud dan Tujuan.....	4
D. Sistematikan Penulisan	4
BAB II.....	6
HASIL EVALUASI RENJA-PD TAHUN LALU	6
A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu.....	6
B. Analisis Kinerja Pelayanan	14
C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	19
D. Review Terhadap Rancangan RKPD.....	20
BAB III.....	33
TUJUAN DAN SASARAN PD.....	33
A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	33
B. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	34
C. Program dan Kegiatan.....	36
BAB IV	45
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD	45
BAB V.....	63
PENUTUP	63

KATA PENGANTAR

Dengan puji syukur atas kehadiran Allah SWT, bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Anambas telah menyusun Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2024. Adapun tujuan Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja ini adalah memudahkan seluruh jajaran aparatur menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.

Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 merupakan rencana pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun yang telah tertuang pada rencana strategis dengan berpedoman Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 – 2026.

Kami menyadari bahwa masih banyak kelemahan dan kekurangan dalam penyusunan rencana kerja ini, oleh karena itu sumbang saran dari berbagai pihak untuk lebih menyempurnakan rencana kerja tahun 2024 sehingga tercapainya tujuan dan sasaran rencana strategis lebih optimal dalam upaya mendukung visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Akhirnya kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah berkenan membantu menyelesaikan penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2024.

Tarempa, 17 Juli 2023

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rancangan Akhir Rencana Kerja merupakan acuan dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam rangka mencapai visi dan misi jangka menengah daerah. Dengan rancangan akhir rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah. Pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun yang telah tertuang pada rencana strategis dengan berpedoman Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 – 2026.

Perumusan Program dan Kegiatan prioritas serta penganggaran menitikberatkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terutama mendukung pelaksanaan pemilihan umum serentak tahun 2024 sebagaimana diamanatkan pada Undang-undang 23 tahun 2014 diantaranya pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 51 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, sehingga Rancangan Akhir Rencana Kerja tahun 2024 dirumus untuk mensinkron dalam rangka menunjang visi, misi Kepala Daerah pada Tahun 2024 yang tertuang dalam Rencana Kerja pembangunan Pemerintah Daerah bertema “Penguatan Sumber Daya Manusia, Ketahanan Ekonomi, serta

Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien, dan Transparan”, dengan Rancangan Prioritas Pembangunan:

1. Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing.
2. Pengembangan dan pemantapan sumberdaya ekonomi dan investasi daerah.
3. Peningkatan Infrastruktur dasar dalam mendukung perekonomian daerah.
4. Peningkatan tata kelola pemerintahan, stabilitas sosial,

Dalam rangka mensinergi tujuan pemerintah daerah dengan penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2024 dengan memperhatikan program prioritas Pemerintah Daerah untuk pencapaian sasaran pembangunan pemerintah daerah pada tahun 2024.

B. Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagai berikut :

1. UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kepulauan Anambas (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 tentang Kerukunan Umat Beragama;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pembauran Kebangsaan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 Tentang Pemantuan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembang Politik di Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 Tentang Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi ORMAS;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kewaspadaan Dini di Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 75, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 76);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 88); dan
19. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 51 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

C. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

1. Sebagai dasar perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rencana kerja anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024;
2. Sebagai dasar evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024.

b. Tujuan

Tujuan disusunnya Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 dalam rangka :

1. Terwujudnya keterpaduan dan sinergi program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang kesatuan bangsa dan politik yang mengarah pada pencapaian tujuan daerah;
2. Tersedianya pedoman dalam penyusunan dan evaluasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan tahunan yang mengarah pada pencapaian Rencana Strategis;
3. Tersedianya acuan bagi pelaksanaan kegiatan tahunan yang akan dijalankan tahun 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
4. Sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah Tahun 2024 untuk penyusunan Anggaran Belanja dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2024.

D. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang Rancangan Akhir Rencana Kerja, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2022 dan capaian Rencana Strategis, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting berkaitan

dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Menggambarkan telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran serta program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Menggambarkan rumusan rencana kerja program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024.

BAB V PENUTUP

Menjelaskan uraian lain berupa catatan-catatan penting, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana pelaksanaan tindakannya.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA-PD TAHUN LALU

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu

Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri merupakan keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Pengukuran Laporan Kinerja dilakukan dengan menggunakan konsep Value for Money. Penggunaan konsep dimaksud memerlukan indikator-indikator sebagai berikut :

- a. Indikator Masukan (Input), untuk mengukur jumlah sumber daya seperti anggaran (dana), SDM, peralatan, material, dan masukan lainnya untuk melakukan satu kegiatan. Dengan meninjau distribusi sumber daya dapat dianalisis apakah alokasi sumber daya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan;
- b. Indikator Keluaran (Output), merupakan indikator yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan, baik berupa fisik maupun berupa non fisik;
- c. Indikator Hasil (Outcome), merupakan indikator yang menunjukkan telah dicapainya maksud dan tujuan dari kegiatan-kegiatan yang telah selesai dilaksanakan atau indikator yang pencerminan berfungsinya keluaran pada jangka menengah.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) tahun 2021-2026 sebagaimana Tabel 2.1. berikut.

Tabel. 2. 1
Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra
Sampai dengan Tahun 2022
Kabupaten Kepulauan Anambas

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Tahun 2026 (Akhir Periode) (RENSTRA)*	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Sampai Dengan Tahun 2023		Catatan
									Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8					Unsur Pemerintahan Umum										
8	1				Kesatuan Bangsa dan Politik										
8	1	1			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
8	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
8	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	4 Dokumen	57,14	
8	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	7 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	4 Dokumen	57,14	
8	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	4 Dokumen	57,14	
8	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD	7 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	4 Dokumen	57,14	
8	1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah DPA Perubahan -SKPD	7 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	4 Dokumen	57,14	
8	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	4Dokumen	57,14	
8	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan dan pelaporan administrasi keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
8	1	1	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	126 Orang	36 Orang	18 Orang	18 Orang	100%	18 Orang	72 Orang	57,14	
8	1	1	2.02	02	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	175 Dokumen	50 Dokumen	25 Dokumen	25 Dokumen	100%	25 Dokumen	100 Dokumen	57,14	

8	1	1	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	4 Dokumen	57,14	
8	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
8	1	1	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	49 Paket	14 Paket	7 Paket	7 Paket	100%	7 Paket	28 Paket	57,14	
8	1	1	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	84 Paket	24 Paket	12 Paket	12 Paket	100%	12 Paket	48 Paket	57,14	
8	1	1	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	84 Paket	24 Paket	12 Paket	12 Paket	100%	12 Paket	48 Paket	57,14	
8	1	1	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	100%	2 Paket	6 Paket	50.00	
8	1	1	2.06	06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 laporan	25 Laporan	25 Laporan	25 Laporan	100%	25 Laporan	75 Laporan	50.00	
8	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
8	1	1	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	25 Unit	0 Unit	0	0	0	5 unit	5 unit	20.00	
8	1	1	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	100%	
8	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
8	1	1	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	72 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	36 Laporan	50.00	
8	1	1	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	36 Laporan	50.00	
8	1	1	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	72 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	36 Laporan	50.00	
8	1	1	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	36 Laporan	50.00	
8	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
8	1	1	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24 Unit	24 Unit	24 Unit	24 Unit	100%	24 Unit	24 Unit	100%	
8	1	2			Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Indeks kepuasan masyarakat di bidang Ideologi dan wawasan kebangsaan	77,00 (Baik)	83,56	76,72	90,74	118,27	76,75	76,75	99,67	
						Jumlah aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, dan kelompok	10 Peraturan	N/A	3 Peraturan	0 Peraturan	200	3 Peraturan	0 Peraturan	200	

						Jumlah kasus tindakan/pernyataan pejabat yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, dan kelompok	12 kasus	N/A	3 Kasus	0 Kasus	200	3 Kasus	0 Kasus	200	
						Jumlah kasus ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis, atau kelompok	10 kasus	N/A	2 kasus	0 Peraturan	200	2 kasus	0 Peraturan	200	
8	1	2	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan										
8	1	2	2.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	21 Dokumen	-	-	-	-	5 Dokumen	5 Dokumen	23,81	
8	1	2	2.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	4 Dokuemn	-	-	-	-	1 Dokuemn	1 Dokuemn	25,00	
8	1	2	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	210 orang	-	-	-	-	50 Orang	50 Orang	25,00	
8	1	2	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	210 Orang	60 Orang	30 Oang	30 Oang	100	30 Oang	120 Orang	57,14	
8	1	2	2.01	05	Pelaksanaan Monitoing Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	16 Laporan	-	-	-	-	4 Laporan	4 Laporan	25,00	
8	1	3			Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Tingkat Partisipasi Pemilih Pemilu/Pilkada/Pilkades (Voters Turnout)	84%	83,47% (Pilkada)	NIHIL	NIHIL	NIHIL	80%	80%	95,84	
						Indeks kepuasan masyarakat dibidang poldagri	78,50 (BAIK)	76,69 (BAIK)	77,00	90,74	117,84	77,50 (BAIK)	77,50 (BAIK)	98,73	
						Jumlah kasus ancaman/ penggunaan kekerasan oleh masyarakat/aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat	20 Kasus	-	4 Kasus	0 Kasus	200	4 Kasus	0 Kasus	200	
						Jumlah kasus hak memilih atau dipilih terhambat	3 Kasus	-	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	

						Jumlah kasus kurang fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih	2 Kasus	-	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL		
						Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD	15%	-	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL		
						Kegiatan kaderisasi yang dilakukan partai peserta pemilu	4 Kegiatan	-	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL		
						Persentase perempuan pengurus partai politik	25%	-	15%	15%	100	18%	18%	72,00		
						Jumlah partai politik aktif yang mendapatkan kursi	10 Partai	10 Partai	10 Partai	10 Partai	100	10 Partai	10 Partai	100		
8	1	3	2.01			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik										
8	1	3	2.01	03		Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	840 Orang	20	20	20	100	200	240	28,57	
8	1	3	2.01	05		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	24 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100	4 Laporan	12 Laporan	50,00	
8	1	4				Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Indeks kepuasan masyarakat dibidang ormas	79,00 (BAIK)	76,69 (BAIK)	77,00	90,74	117,84	77,50 (BAIK)	98,73	77,00	
							Jumlah kasus ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat/aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat	20 Kasus	-	4 Kasus	0	200	4 Kasus	0	200	
						Jumlah organisasi masyarakat yang terbukti melakukan pelanggaran hukum dan telah dijatuhi putusan yang berkekuatan hukum tetap	6 Ormas	-	1 Ormas	0	200	1 Ormas	0	200		

						Jumlah organisasi masyarakat yang kegiatannya mendukung program kerja pemerintah kabupaten kepulauan anambas	8 Ormas	-	3 Ormas	0	0	3 Ormas	0	0	
8	1	4	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksana naan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan										
8	1	4	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	170 Orang	20 Orang	30 Orang	30 Orang	100	30 Orang	80 Orang	47,06	
8	1	4	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	37 Laporan	4 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	100	5 Laporan	14 Laporan	37,84	
8	1	5			Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Indeks kepuasan masyarakat dibidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama	77,50 (Baik)	76,69 (Baik)	76,72 (Baik)	90,74	118,27	76,69 (Baik)	83,33 (BAIK)	107,52	
						Jumlah aturan tertulis yang membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama	6 aturan	-	1 aturan	0	200	1 aturan	0	200	
						Jumlah kasus tindakan/pernyataan pejabat membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama	5 kasus	-	2 kasus	0	200	2 kasus	0	200	
						Jumlah kasus ancaman/ penggunaan kekerasan dari satu kelompok terkait ajaran agama	5 kasus	-	2 kasus	0	200	2 kasus	0	200	
						Jumlah Pelajar/Masyarakat yang memperoleh pemahaman bahaya narkoba	1225		-	147	14800	-	147	12,00	
						Monitoring dan Evaluasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	25 kali	-	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	
						Jumlah laporan di bidang ketahanan ekonomi sosial budaya dan agama	30 laporan	-	5 laporan	5 laporan	100	5 laporan	5 laporan	16,67	
						Jumlah koordinasi/ komunikasi dengan Forum Kerukunan Umat Beragama	32 kali	-	2 kali	2 kali	100	2 kali	2 kali	6,25	
						Jumlah tim/ forum/ gugus tugas yang terbentuk	1 tim/ forum/ gugus tugas	-	1 tim/ forum/ gugus tugas	1 tim/ forum/ gugus tugas	100	1 tim/ forum/ gugus tugas	1 tim/ forum/ gugus tugas	100	
						Jumlah kegiatan sosial budaya masyarakat	5 kali	-	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	
						Jumlah kegiatan RAN P4GN	5 kali	-	Nihil	2	200	Nihil	2	40,00	

8	1	5	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya										
8	1	5	2.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan	41 Dokumen	-	4 Dokumen	4 Dokumen	100	9 Dokumen	13 Dokumen	31,71	
8	1	5	2.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Eko nomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	4 Dokumen	Nihil	Nihil	Nihil	0	1 Dokuen	1 Dokuen	25,00	
8	1	5	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	174 Orang	29 Orang	29 Orang	29 Orang	100	29 Orang	87 Orang	25,00	
8	1	5	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	217 Orang	62 Orang	31 Orang	31 Orang	100	31 Orang	124 Orang	57,14	
8	1	5	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	20 Laporan	-	4 Laporan	4 Laporan	100	4 Laporan	8 Laporan	40,00	
8	1	6			Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase penanganan gangguan keamanan dan potensi konflik sosial di daerah	85%	80%	80%	80%	100%	80%	80%	94,12	
8	1	6	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	jumlah fasilitas pelaksanaan rapat koordinasi terkait kewaspadaan dini dan penanganan konflik di daerah	60 Rapat	10 Rapat	10 Rapat	10 Rapat	100	10 Rapat	30 Rapat	50,00	
8	1	6	2.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspa daan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	12 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	6 Dokumen	50,00	

8	1	6	2.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	12 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	6 Dokumen	50,00	
8	1	6	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	100 Orang		0	0	0	20 Orang	20 Orang	20,00	
8	1	6	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, paman tauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	120 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	100	20 Orang	60 Orang	50,00	
8	1	6	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	2190 Laporan Harian	365 Laporan Harian	365 Laporan Harian	365 Laporan Harian	100	365 Laporan Harian	1095 Laporan Harian	50.00	
8	1	6	2.01	06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	6 Dokumen	50,00	

B. Analisis Kinerja Pelayanan

Analisis kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Anambas dilakukan untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis. Pencapaian kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2022 bertujuan :

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas Indikator adalah **Nilai Reformasi Birokrasi** adalah upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan. Nilai Reformasi Birokrasi dipengaruhi oleh komponen pengungkit yang dilaksanakan melalui 8 (delapan) area perubahan yaitu:
 - 1) Manajemen Perubahan;
 - 2) Penguatan Sistem Pengawasan;
 - 3) Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 - 4) Penguatan Kelembagaan;
 - 5) Penguatan Tatalaksana;
 - 6) Penguatan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara;
 - 7) Penguatan Peraturan Perundang-Undangan; dan
 - 8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Berdasarkan hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mendapatkan penghargaan sebagai perangkat daerah terbaik ke – 11 dalam PMPRB Tahun 2022 dengan predikat nilai 60,92 (B) dari target nilai 64,00 (B), sehingga untuk tahun selanjutnya akan terus ditingkatkan

Adapun indikator yang menunjang reformasi birokrasi adalah sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) dan Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Evaluasi SAKIP perangkat daerah dilaksanakan oleh Inspektorat dan dituangkan kedalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) yang diberikan kepada Bakesbangpol setiap tahunnya. Dari LHE dapat diketahui nilai SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada tahun 2022 dengan nilai 64,80

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pengumpulan data survei ini dilakukan dengan cara pengisian kuesioner oleh responden yang merupakan stakeholder atau penerima layanan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Adapun hasil dari SKM adalah nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Nilai IKM merupakan nilai rata-rata dari seluruh unsur pelayanan yang dinilai menggunakan Skala Likert (1-4) kemudian dikalikan dengan nilai 25 (dua puluh lima).

Adapun unsur pelayanan yang menjadi indikator untuk mendapatkan nilai IKM adalah :

1) Persyaratan

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

2) Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

3) Waktu Penyelesaian

Waktu Penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

4) Biaya/Tarif

Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

5) Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6) Kompetensi Pelaksana

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.

7) Perilaku Pelaksana

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

8) Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

9) Sarana dan prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Selanjutnya pada tahun 2022 berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat Badan Kesatuan Bangsa dan politik memperoleh skor 90,74.

2. Mewujudkan stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa yaitu dengan sasaran :

a. Menurunnya Jumlah Kasus Pelanggaran Demokrasi. Pelanggaran Demokrasi adalah berbagai macam kebijakan atau tindakan acaman/kekerasan yang dilakukan oleh aparat pemerintah atau masyarakat terhadap kebebasan sipil dan hak-hak politik masyarakat. Adapun Indikator Pelanggaran Demokrasi adalah sebagai berikut :

- 1) Jumlah kasus ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat/aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat
- 2) Jumlah kasus hak memilih atau dipilih terhambat
- 3) Jumlah kasus kurang fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih
- 4) Jumlah kasus ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat/aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat

- 5) Jumlah aturan tertulis yang membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama
 - 6) Jumlah kasus tindakan/ Pernyataan pejabat membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama
 - 7) Jumlah kasus ancaman/ penggunaan kekerasan dari satu kelompok terkait ajaran agama
 - 8) Jumlah aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, dan kelompok
 - 9) Jumlah kasus tindakan/ pernyataan pejabat yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, dan kelompok
 - 10) Jumlah kasus ancaman/ penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis, atau kelompok
- b. Meningkatnya Pemahaman Aparatur dan Masyarakat tentang kesatuan bangsa, politik dan kewaspadaan dini. Penguatan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Pendidikan Politik merupakan bentuk kegiatan sosialisasi dan seminar yang diadakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, lintas instansi maupun instansi vertikal yang mengundang pejabat dari Bakesbangpol sebagai narasumber. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan meningkatkan rasa kesatuan dan persatuan sebagai bangsa Indonesia.

Harapan kedepannya agar seluruh anggota Bapul dapat berstatus sebagai PNS agar dapat mengikuti diklat intelijen dan jumlahnya proporsional dengan jumlah kecamatan/desa. Selain itu juga anggota forum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM) yang berada di pusat dan kecamatan juga perlu di berdayakan dan diberikan penguatan pengetahuan dibidang intelijen dan kewaspadaan dini.

Berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas 2021-2026, bahwa dalam rangka mendukung pencapaian Visi, yaitu : **“Kepulauan Anambas sebagai Kabupaten Maritim Terdepan yang Berdaya Saing, Maju dan Berakhlakul Karimah”** serta Misi ke-III sesuai dengan urusan dan kewenangan Badan Kesatuan dan Politik, yaitu : *“Menciptakan Tata Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Melayani serta Otonomi Desa yang Bersinergi”*. Keselarasan antara Tujuan dan Sasaran serta Indikator Kinerja Utama pada RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas 2021-2026 dengan

Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa Politik periode 2021-2026 sebagaimana dijelaskan dalam Tabel 2.2. dan Tabel 2.3. berikut.

Tabel 2.2
Tujuan dan Sasaran serta Indikator
Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026
Yang Menjadi Urusan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

VISI dan MISI	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL	TARGET						KONDISI AKHIR
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
VISI : Kepulauan Anambas sebagai Kabupaten Maritim Terdepan yang Berdaya Saing, Maju dan Berakhlakul karimah										
MISI III : Menciptakan Tata Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Melayani serta Otonomi Desa yang Bersinergi										
	T.1. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang transparan dan akuntabel									
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah yang transparan dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	CC (51,76)	B (60,1)	B (63,00)	B (67,00)	B (69,00)	BB (71,00)	BB (75,00)	BB (75,00)	
	Nilai Predikat SAKIP	CC (53,38)	B (64,01)	B (68,00)	BB (71,00)	BB (74,00)	BB (78)	A (81)	A (81)	
	Opini BPK atas pemeriksaan Keuangan daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	

Tabel 2.3
Tujuan, Sasaran dan Indikator RENSTRA
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021-2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-						KONDISI AKHIR
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas		Nilai Reformasi Birokrasi	61,50	64,00	67,00	70,00	73,00	75,00	75,00
		Terwujudnya Tatakelola Pemerintah yang Transparan Akuntabel dan Pelayanan yang berkualitas	Nilai SAKIP	62,50	67,00	69,50	72,00	75,00	77,00	77,00
			Indeks Kepuasan Masyarakat	76,69 (Baik)	76,82 (Baik)	77,45 (Baik)	77,75 (Baik)	77,90 (Baik)	78,00 (Baik)	78,00 (Baik)
2	Mewujudkan stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa		Jumlah Konflik Sosial didaerah	2 kasus	2 Kasus	2 Kasus	1 Kasus	1 Kasus	1 Kasus	1 Kasus
		Menurunnya jumlah kasus pelanggaran demokrasi	Jumlah Kasus Pelanggaran Demokrasi	4 Kasus	4 Kasus	3 Kasus	3 Kasus	2 Kasus	1 Kasus	1 Kasus
		Meningkatnya pemahaman aparaturnya masyarakat tentang kesatuan bangsa, politik dan kewaspadaan dini	Jumlah aparaturnya masyarakat yang memperoleh penguatan ideologi pancasila, wawasan kebangsaan, ketahanan nasional, pendidikan politik dan kewaspadaan dini	278 Orang	300 Orang	302 Orang	314 Orang	326 Orang	326 Orang	326 Orang

Berdasarkan Tabel 2.2 dan Tabel 2.3. tersebut diatas, maka Analisis kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Anambas 2021-2026 tertuang dalam capaian Sasaran Strategis Tahun 2021 adalah sebagaimana sebagai berikut :

Tabel 2.4.
Pencapaian Kinerja Sasaran Tahun 2022

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra PD						Realisasi Capaian				Proyeksi 2023	Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022				
1.	Nilai SAKIP			62,50	67,00	69,50	72,00	75,00	77,00	52,79	64,80			69,50	
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat			76,69 (Baik)	76,82 (Baik)	77,45 (Baik)	77,75 (Baik)	77,90 (Baik)	78,00 (Baik)	83,56	90,74			90,74	
3.	Jumlah Kasus Pelanggaran Demokrasi			4 Kasus	4 Kasus	3 Kasus	3 Kasus	2 Kasus	1 Kasus	0	0			0	
4.	Jumlah aparatur dan masyarakat yang memperoleh penguatan ideologi pancasila, wawasan kebangsaan, ketahanan nasional, pendidikan politik dan kewaspadaan dini			278 Orang	300 Orang	302 Orang	314 Orang	326 Orang	326 Orang	519 orang	363 orang			302 Orang	

C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan syarat utama bagi kelangsungan pemerintahan dan pembangunan nasional. Oleh karena itu upaya dan langkah untuk memelihara persatuan dan kesatuan bangsa perlu senantiasa dilakukan secara dinamis berdasarkan perkembangan situasi yang dihadapi.

Bahwa bangsa yang dibangun diatas kemajemukan sehingga memiliki potensi yang tinggi terhadap kerawanan konflik sosial, budaya dan politik di daerah. Selain itu juga terdapat permasalahan lainnya diantaranya kebijakan publik yang belum memuaskan masyarakat, kesenjangan sosial ekonomi dan rendahnya kesadaran tentang hukum. Hal ini merupakan hambatan yang berarti bagi terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa dan berpotensi terhadap disintegrasi bangsa.

Disamping itu fenomena faktual terhadap kondisi kehidupan masyarakat masih dihadapkan pada kurangnya kesadaran demokrasi dan berpolitik serta rasa toleransi sehingga berpengaruh pada faktor ancaman terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa.

Memperhatikan situasi yang berkembang pada dewasa ini di Kabupaten Kepulauan Anambas, maka dikemukakan beberapa isu-isu strategis yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi dapat dirumuskan isu-isu strategis pembangunan bidang kesatuan bangsa dan politik Kabupaten Kepulauan Anambas untuk 5 (lima) tahun kedepan sebagai berikut :

1. Kondusivitas Wilayah : Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam penyelesaian dan pencegahan konflik guna menjaga kondusivitas wilayah;
2. Toleransi : Penguatan kerukunan antar umat beragama dan pembauran kebangsaan dalam menjaga ketahanan bangsa
3. Demokrasi : Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila

D. Review Terhadap Rancangan RKPD

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2024 merupakan perencanaan tahun 2024 dengan memperhatikan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta porsi anggaran tersedia pada tahun rencana sangat jauh ketercukupan dari kebutuhan. Selanjutnya sebagai langkah awal RKPD juga merupakan landasan kegiatan perencanaan pembangunan tahunan tahun 2024 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 Tahun 2019 yang berisi program dan kegiatan. Program dan kegiatan yang tercantum dalam RKPD dibandingkan dengan analisis kebutuhan berdasarkan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah sehingga memungkinkan kurang maksimal pelaksanaan program prioritas dalam pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas.

Pada tahun 2024 program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam mendukung pelaksanaan pemilihan umum serentak tahun 2024 dengan menitikberatkan pada penyelenggaraan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri yang meliputi pendidikan politik bagi aparatur/masyarakat, sosial ekonomi serta organisasi masyarakat berkelanjutan. Pada Rencana Kerja Tahun 2024 akan di sinkronisasi dengan Rancangan RKPD Kabupaten Kepulauan Anambas dengan menyesuaikan porsi anggaran yang tersedia selanjut pada BAB III akan diuraikan pelaksanaan program dan kegiatan serta kebutuhan anggaran yang sesuai.

Berikut ini adalah tabel review Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024.

Rencana Kerja						Rancangan awal/Penyesuaian anggaran				
N o	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lo ka si	Target Kerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lo ka si	Target Kerja	Pagu Indikatif
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Penunjang urusan pemerintah daerah	KK A	100%		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Penunjang urusan pemerintah daerah	K KA	100%	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	KK A	100%		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	K KA	100%	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1 Dokumen	2.732.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1 Dokumen	1.530.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD		1 Dokumen	2.971.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD		1 Dokumen	1.570.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 Dokumen	2.102.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 Dokumen	1.100.000
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD		1 Dokumen	2.007.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD		1 Dokumen	1.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah DPA Perubahan -SKPD		1 Dokumen	1.890.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah DPA Perubahan -SKPD		1 Dokumen	1.590.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 Dokumen	1.388.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 Dokumen	1.388.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan dan pelaporan administrasi keuangan		100%		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan dan pelaporan administrasi keuangan		100%	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		18 Orang/Bu lan	3.144.802.6 50	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		18 Orang/Bu lan	2.963.920.000
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		25 Dokumen	104.450.00 0	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		25 Dokumen	122.500.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Dokumen	2.840.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Dokumen	2.840.000
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pengadministrasian Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		100%		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pengadministrasian Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		100%	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		1 Laporan	15,000,000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		1 Laporan	15,000,000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum		100%		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum		100%	

	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		7 Paket	53,063,800	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		7 Paket	24.600.000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		12 Paket	36,999,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		12 Paket	2.710.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		12 Paket	49.530.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		12 Paket	32.250.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		2 Paket	39.996.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		2 Paket	17.400.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		25 Laporan	189.400.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		25 Laporan	143.584.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan sarana dan prasarna sesuai kebutuhan		100%		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan sarana dan prasarna sesuai kebutuhan		100%	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		2 Unit	80,000,000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		2 Unit	64.479.360
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		6 Unit	35,000,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		6 Unit	35,000,000
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1 Unit	200.000.000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1 Unit	197.183.300
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100%		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100%	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 Laporan	29.998.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 Laporan	9.300.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	18.214.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	17.450.000
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		12 Laporan	32.299.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		12 Laporan	18.400.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	524.013.755	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	451.280.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran		100%		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran		100%	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		24 Unit	39.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		24 Unit	18.140.000
	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Indeks kepuasan masyarakat di bidang Ideologi dan wawasan kebangsaan		76,75 (Baik)		Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Indeks kepuasan masyarakat di bidang Ideologi dan wawasan kebangsaan		76,75 (Baik)	
		Jumlah aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, dan kelompok		2 Peraturan			Jumlah aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, dan kelompok		2 Peraturan	

		Jumlah kasus tindakan/ Pernyataan pejabat yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, dan kelompok		2 kasus			Jumlah kasus tindakan/ Pernyataan pejabat yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, dan kelompok		2 kasus	
		Jumlah kasus ancaman/ penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis, atau kelompok		2 kasus			Jumlah kasus ancaman/ penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis, atau kelompok		2 kasus	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Terbentuknya Forum Pembauran Kebangsaan		Nihil		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Terbentuknya Forum Pembauran Kebangsaan		Nihil	
		Terbentuknya gugus tugas GNRM Kabupaten Kepulauan Anambas		Nihil			Terbentuknya gugus tugas GNRM Kabupaten Kepulauan Anambas		Nihil	
		Jumlah laporan rutin Forum Pembauran Kebangsaan		2 kali			Jumlah laporan rutin Forum Pembauran Kebangsaan		2 kali	
		Jumlah laporan GNRM		3 laporan			Jumlah laporan GNRM		3 laporan	
		Jumlah laporan SPJ dana hibah FPK		1 dokumen			Jumlah laporan SPJ dana hibah FPK		1 dokumen	
		Terlaksananya komunikasi dengan Forum Pembauran Kebangsaan		4 kali			Terlaksananya komunikasi dengan Forum Pembauran Kebangsaan		4 kali	
		Monitoring dan Evaluasi di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan		4 kali			Monitoring dan Evaluasi di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan		4 kali	
		Persentase fasilitasi dan mediasi kebangsaan yang terlayani		100%			Persentase fasilitasi dan mediasi kebangsaan yang terlayani		100%	
		Jumlah update data tokoh masyarakat dan tokoh adat		1 kali			Jumlah update data tokoh masyarakat dan tokoh adat		1 kali	
		Jumlah pendidikan/pelatihan bidang ideologi wawasan kebangsaan dan bela negara		2 kali			Jumlah pendidikan/pelatihan bidang ideologi wawasan kebangsaan dan bela negara		2 kali	
		Jumlah rapat koordinasi Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		1 kali			Jumlah rapat koordinasi Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		1 kali	
		Tersalurnya bantuan dana hibah Untuk Forum Pembauran Kebangsaan		1 kali			Tersalurnya bantuan dana hibah Untuk Forum Pembauran Kebangsaan		1 kali	
		Jumlah kegiatan GNRM		2 kali			Jumlah kegiatan GNRM		2 kali	
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun		5 Dokumen	200.000.000	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun		5 Dokumen	0
							Terlaksananya kegiatan GNRM		2 kali	
							Jumlah laporan GNRM		3 kali	

	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun		1 Dokumen	800.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun		1 Dokumen	673.600.000
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		50 orang	300.000.000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		50 orang	100.000.000
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		30 Orang	370.000.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		30 Orang	139.158.000
	Pelaksanaan Monitoing Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		4 Laoporan	60.000.000	Pelaksanaan Monitoing Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		4 Laporan	0
	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Tingkat Partisipasi Pemilih Pemilu/Pilkada/Pilkades (Voters Turnout)		80%		Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Tingkat Partisipasi Pemilih Pemilu/Pilkada/Pilkades (Voters Turnout)		80%	
		Indeks kepuasan masyarakat dibidang poldagri		77,50 (BAIK)			Indeks kepuasan masyarakat dibidang poldagri		77,50 (BAIK)	
		Jumlah kasus ancaman/ penggunaan kekerasan oleh masyarakat/aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat		3 Kasus			Jumlah kasus ancaman/ penggunaan kekerasan oleh masyarakat/aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat		3 Kasus	
		Jumlah kasus hak memilih atau dipilih terhambat		NIHIL			Jumlah kasus hak memilih atau dipilih terhambat		NIHIL	
		Jumlah kasus kurang fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih		NIHIL			Jumlah kasus kurang fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih		NIHIL	
		Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD		NIHIL			Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD		NIHIL	
		Kegiatan kaderisasi yang dilakukan partai peserta pemilu		2 Kegiatan			Kegiatan kaderisasi yang dilakukan partai peserta pemilu		2 Kegiatan	
		Persentase perempuan pengurus partai politik		20%			Persentase perempuan pengurus partai politik		20%	

		Jumlah partai politik aktif yang mendapatkan kursi		10 Partai			Jumlah partai politik aktif yang mendapatkan kursi		10 Partai	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik					Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik				
	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		200 Orang	518.048.718	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		200 Orang	618.100.000
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		4 Laporan	50.000.000	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		4 Laporan	227.750.000
		Indeks kepuasan masyarakat dibidang ormas		78,00 (BAIK)			Indeks kepuasan masyarakat dibidang ormas		78,00 (BAIK)	
	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah kasus ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat/aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat		3 Kasus		Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah kasus ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat/aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat		3 Kasus	
		Jumlah organisasi masyarakat yang terbukti melakukan pelanggaran hukum dan telah dijatuhi putusan yang berkekuatan hukum tetap		1 Ormas			Jumlah organisasi masyarakat yang terbukti melakukan pelanggaran hukum dan telah dijatuhi putusan yang berkekuatan hukum tetap		1 Ormas	
		Jumlah organisasi masyarakat yang kegiatannya mendukung program kerja pemerintah kabupaten kepulauan anambas		5 Ormas			Jumlah organisasi masyarakat yang kegiatannya mendukung program kerja pemerintah kabupaten kepulauan anambas		5 Ormas	

	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksana Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan					Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksana Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan			
	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	30 Orang	100,000,000		Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	30 Orang	50,000,000
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	6 Laporan	60.000.000		Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	6 Laporan	40.090.000
	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Indeks kepuasan masyarakat dibidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama	76,85 (Baik)			Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Indeks kepuasan masyarakat dibidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama	76,85 (Baik)	
		Jumlah aturan tertulis yang membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama	1 aturan				Jumlah aturan tertulis yang membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama	1 aturan	
		Jumlah kasus tindakan/pernyataan pejabat membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama	1 kasus				Jumlah kasus tindakan/pernyataan pejabat membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama	1 kasus	
		Jumlah kasus ancaman/penggunaan kekerasan dari satu kelompok terkait ajaran agama	1 kasus				Jumlah kasus ancaman/penggunaan kekerasan dari satu kelompok terkait ajaran agama	1 kasus	
		Jumlah Pelajar/Masyarakat yang memperoleh pemahaman bahaya narkoba	245				Jumlah Pelajar/Masyarakat yang memperoleh pemahaman bahaya narkoba	245	
		Monitoring dan Evaluasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	5 kali				Monitoring dan Evaluasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	5 kali	
		Jumlah laporan di bidang ketahanan ekonomi sosial budaya dan agama	5 laporan				Jumlah laporan di bidang ketahanan ekonomi sosial budaya dan agama	5 laporan	
		Jumlah koordinasi/komunikasi dengan Forum Kerukunan Umat Beragama	6 kali				Jumlah koordinasi/komunikasi dengan Forum Kerukunan Umat Beragama	6 kali	
		Jumlah tim/ forum/ gugus tugas yang terbentuk	Nihil				Jumlah tim/ forum/ gugus tugas yang terbentuk	Nihil	
		Jumlah kegiatan sosial budaya masyarakat	1 kali				Jumlah kegiatan sosial budaya masyarakat	1 kali	
		Jumlah kegiatan RAN P4GN	1 kali				Jumlah kegiatan RAN P4GN	1 kali	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Kebijakan/ Peraturan/ pedoman/ rekomendasi Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	2 kebijakan /peraturan/edaran			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Kebijakan/ Peraturan/ pedoman/ rekomendasi Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	2 kebijakan /peraturan/edaran	

		Terbentuknya Forum Kerukunan Umat Beragama		Nihil			Terbentuknya Forum Kerukunan Umat Beragama		Nihil	
		Terbentuknya Tim RAN P4GN Kabupaten Kepulauan Anambas		Nihil			Terbentuknya Tim RAN P4GN Kabupaten Kepulauan Anambas		Nihil	
		Jumlah laporan rutin RAN P4GN		2 laporan			Jumlah laporan rutin RAN P4GN		2 laporan	
		Jumlah laporan rutin Forum Kerukunan Umat Beragama		2 laporan			Jumlah laporan rutin Forum Kerukunan Umat Beragama		2 laporan	
		Jumlah laporan SPJ dana hibah FKUB		1 dokumen			Jumlah laporan SPJ dana hibah FKUB		1 dokumen	
		Terlaksananya komunikasi dengan Forum Kerukunan Umat Beragama		4 kali			Terlaksananya komunikasi dengan Forum Kerukunan Umat Beragama		4 kali	
		Monitoring dan Evaluasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya		4 kali			Monitoring dan Evaluasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya		4 kali	
		Persentase fasilitasi dan mediasi keagamaan yang terlayani		100%			Persentase fasilitasi dan mediasi keagamaan yang terlayani		100%	
		Terlaksananya update data tokoh agama dan rumah ibadah		1 kali			Terlaksananya update data tokoh agama dan rumah ibadah		1 kali	
		Jumlah agama yang terlibat dalam dialog antar umat beragama		4 agama			Jumlah agama yang terlibat dalam dialog antar umat beragama		4 agama	
		Jumlah rapat komunikasi dan koordinasi Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Agama		2 kali			Jumlah rapat komunikasi dan koordinasi Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Agama		2 kali	
		Jumlah kegiatan RAN P4GN di Kepulauan Anambas		1 kali			Jumlah kegiatan RAN P4GN di Kepulauan Anambas		1 kali	
		Terselurnya bantuan dana hibah Untuk Forum Kerukunan Umat Beragama		1 kali			Terselurnya bantuan dana hibah Untuk Forum Kerukunan Umat Beragama		1 kali	
		Terselenggaranya kegiatan Sosial Budaya masyarakat		1 kali			Terselenggaranya kegiatan Sosial Budaya masyarakat		1 kali	
		Jumlah masyarakat yang terlibat langsung dalam kegiatan Sosial Budaya		50 orang			Jumlah masyarakat yang terlibat langsung dalam kegiatan Sosial Budaya		50 orang	
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan		9 Dokumen	200.000.000	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan		9 Dokumen	0
	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun		1 Dokumen	200.000.000	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun		1 Dokumen	149.900.000

	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	29 Orang	150,000,000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	29 Orang	0
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	31 orang	370.000.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	31 orang	244.000.000
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	4 Laporan	60.000.000	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	4 Laporan	25.000.000
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase penanganan gangguan keamanan dan potensi konflik sosial di daerah	85%		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase penanganan gangguan keamanan dan potensi konflik sosial di daerah	85%	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	jumlah fasilitas pelaksanaan rapat koordinasi terkait kewaspadaan dini dan penanganan konflik di daerah	10 Rapat		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	jumlah fasilitas pelaksanaan rapat koordinasi terkait kewaspadaan dini dan penanganan konflik di daerah	10 Rapat	
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	2 Dokumen	75.000.000	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	2 Dokumen	22.740.000
	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	2 Dokumen	278,900,000	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	2 Dokumen	39.609.000

	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspa daan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspa daan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		20 Orang	200.000.000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspa daan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspa daan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		20 Orang	0
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, peman tauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, kewaspa daan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		20 Orang	289,876,000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, peman tauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, kewaspa daan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		20 Orang	39.608.000
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspa daan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewas padaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		365 Laporan Harian	150.000.000	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspa daan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewas padaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		365 Laporan Harian	31.773.000
	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota		2 Dokumen	465,000,000	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota		2 Dokumen	452.376.000
	Jumlah				9.504.520.923	Jumlah	6.997.918.660			

E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat belum didapati usulan karena pelaksanaan Musrenbang Kabupaten Kepulauan Anambas khususnya Musrenbang Tingkat Kecamatan belum, dan juga bahwa tidak terdapat usulan dari para pemangku kepentingan yang ditujukan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Anambas, berikut tabel penelaahan usulan program dan kegiatan sebagai berikut berikut.

Tabel 2.6.
Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2024

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	Tidak Ada Usulan				

Sebagai bahan informasi dalam penyusunan program dan kegiatan dalam Rencana Kerja (RENJA) 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Anambas dapat di uraikan sebagai berikut :

- **Kesekretariatan**

Melalui sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengusulkan Program dan kegiatan dengan arah kebijakan untuk :

1. Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran
2. Mengoptimalkan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja
3. Menigkatkan saran dan prasarana aparatur dan pemeliharannya
4. Meningkatkan kualitas SDM aparatur
5. Peningkatan pelayanan prima kepada masyarakat

Melalui program dan kegiatan yang usulkan :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- **Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama.**

Melalui bidang ini mengusulkan Program dan kegiatan dengan arah kebijakan untuk :

1. Memantapkan wawasan kebangsaan masyarakat yang menopang kokohnya integrasi nasional dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Memantapkan pembauran bangsa, kerukunan umat beragama disegala aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara;
3. Meningkatkan kesadaran Bela Negara segenap warga masyarakat;
4. Memfungsikan forum yang dibentuk oleh perangkat daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Melalui program dan kegiatan yang usulkan :

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
 - a. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
2. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
 - a. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

- **Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan**

Melalui bidang ini mengusulkan Program dan kegiatan dengan arah kebijakan untuk :

1. Mengembangkan sistem politik yang demokratis yang ditopang dengan kemandirian infrastruktur politik, mantapnya interaksi politik antar infrastruktur dan suprastruktur politik, serta semakin demokratisnya sikap dan perilaku masyarakat melalui Pendidikan politik;
2. Mendewasakan sikap dan perilaku masyarakat, yang dilandasi mantapnya pemahaman dan pengamalan etika dan moral yang tertuang

dalam 4 Pilar Kebangsaan (UUD 1945, Pancasila, NKRI, Bhineka Tunggal Ika).

Melalui program dan kegiatan yang usulkan :

1. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
 - a. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
2. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
 - a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

- **Bidang Kewaspadaan Nasional dan Kerjasama Intelijen**

Melalui bidang ini mengusulkan Program dan kegiatan dengan arah kebijakan untuk :

1. Mendeteksi dan menganalisis gejala dini terjadinya konflik yang mengarah kepada gangguan dan ancaman terhadap ketentraman masyarakat
2. Meningkatkan kerjasama intelkam
3. Meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap berbagai bentuk Ancaman, Gangguan, Hambatan dan Tantangan (AGHT) serta terhadap berbagai gejala konflik yang akan timbul
4. Mengatasi berbagai konflik sektarian dan konflik sosial dalam masyarakat yang dilandasi dengan kajian strategis yang konprehensif guna memecahkan permasalahan aktual daerah dan bangsa
5. Menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif bagi implementasi kebijakan publik

Melalui program dan kegiatan yang usulkan :

1. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
 - a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PD

A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, sebagaimana termuat dalam Lampiran III tentang Matrik Pembangunan RPJM Nasional Tahun 2020-2024, bahwa pada Matrik Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga memuat Program Kementerian Dalam Negeri dan yang terkait dengan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri ditetapkan 1 (satu) Program, yaitu : “Program Pembinaan Politik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum”. Program tersebut merupakan program teknis dengan tujuan memperkuat kesatuan dan persatuan nasional serta stabilitas politik dalam negeri yang dilandasi oleh semangat dan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 melalui pembangunan yang demokratis dan berkedulatan rakyat. Pelaksanaannya didukung melalui 5 (lima) kegiatan prioritas sebagaimana termuat dalam Matrik tersebut, yaitu:

1. Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan (1 indikator);
2. Fasilitasi Politik Dalam Negeri (2 indikator);
3. Fasilitasi Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya (1 indikator);
4. Fasilitasi Kewaspadaan Nasional (4 indikator);
5. Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan (1 Indikator).

Penetapan program dan kegiatan prioritas tersebut di atas mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dari Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum yang mengacu pada Permendagri Nomor 43 Tahun 2015 Pasal 144 dan 145, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, serta fasilitasi organisasi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, penerapan penghayatan dan pengamalan ideologi Pancasila, pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, pembinaan kewaspadaan nasional, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi organisasi masyarakat dan fasilitasi penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
4. Pelaksanaan pembinaan di bidang penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, fasilitasi organisasi masyarakat, penerapan penghayatan dan pengamalan ideologi Pancasila, pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, pembinaan kewaspadaan nasional, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, serta fasilitasi penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
5. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, fasilitasi organisasi masyarakat, penerapan penghayatan dan pengamalan ideologi Pancasila, pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, pembinaan kewaspadaan nasional, pembinaan kerukunan antar dan intra suku, umat beragama,
6. Peningkatan kapasitas dan Akuntabilitas Kelembagaan Demokrasi melalui percepatan penyelesaian Undang-Undang Politik, Fasilitasi Penguatan Organisasi Masyarakat dan Partai Politik, dan Peningkatan Kerukunan Umat Beragama; dan
7. Penguatan Integritas Nasional yang didukung dengan pendidikan kebangsaan dan Cinta Tanah Air melalui Wawasan Kebangsaan, Pembauran Kebangsaan, Bela Negara dan Pengembangan Budaya dan Etika Politik.

B. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran dalam Renja Perangkat Daerah adalah turunan penjabaran tujuan Renstra Perangkat Daerah yang ingin dicapai dalam waktu 1 (satu) tahun didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Anambas. Perumusan tujuan menjabarkan apa yang harus dicapai dan dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dan akan membantu mempermudah penilaian kinerja.

Berdasarkan hasil analisis dengan mempertimbangkan permasalahan, isu strategis dan tinjauan faktor eksternal, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menetapkan 2 (dua) Tujuan pembangunan jangka menengah tahun 2021-2026, yaitu:

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas
2. Mewujudkan stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran pembangunan jangka menengah tahun 2021-2026, sebagai berikut :

1. Terwujudnya Tatakelola Pemerintah yang Transparan Akuntabel dan Pelayanan yang berkualitas;
2. Menurunnya jumlah kasus pelanggaran demokrasi;
3. Meningkatnya pemahaman aparatur dan masyarakat tentang kesatuan bangsa, politik dan kewaspadaan dini.

Untuk mengevaluasi pencapaian sasaran tersebut, maka dirumuskan indikator sasaran dan formulasi/rumus perhitungan indikator sasaran. Indikator sasaran yang digunakan untuk menilai sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Anambas sampai dengan tahun 2021-2026 merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) masing-masing bagian/bidang selaku penanggung jawab pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah.

Tabel 3.1

Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Kinerja Tahun 2024

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas		Nilai Reformasi Birokrasi	Nilai	70,00
	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah yang Transparan Akuntabel dan Pelayanan yang berkualitas	Nilai SAKIP	Nilai	72,00
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	77,90 (Baik)
Mewujudkan pemahaman serta kesadaran dalam kehidupan politik masyarakat.		Jumlah Konflik Sosial di Daerah	Kasus	1
	Menurunnya jumlah kasus pelanggaran demokrasi	Jumlah Kasus Pelanggaran Demokrasi	Kasus	3
	Meningkatnya pemahaman aparatur dan masyarakat tentang kesatuan bangsa, politik dan kewaspadaan dini	Jumlah aparatur dan masyarakat yang memperoleh penguatan ideologi pancasila, wawasan kebangsaan, ketahanan nasional, pendidikan politik dan kewaspadaan dini	Orang	314

C. Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan disertai kebutuhan pendanaan yang dimuat dalam Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 ini, merupakan turunan dari Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan selanjutnya menyesuaikan porsi anggaran yang tersedia dengan program dan kegiatan prioritas yang telah terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026. Program pembangunan ini sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 dan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024, serta menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2024.

Pada tahun 2024 yaitu menuju pesta demokrasi yaitu pemilihan umum serentak dengan porsi anggaran yang tersedia masih kurang memadai sehingga melalui rencana kerja mengusulkan pendanaan dengan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif dalam periode perencanaan pembangunan tahun 2024, yang selanjutnya dapat dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2024.

Perumusan kegiatan pada setiap program telah disinkronisasikan dengan peraturan perundangan yang mengatur tentang perencanaan pembangunan daerah dan kebutuhan penganggaran sehingga perumusan program dan kegiatan juga telah diarahkan untuk mendukung pencapaian kinerja pada setiap program guna terwujudnya pencapaian tujuan dan sasaran rencana strategis Tahun 2021-2026 serta pencapaian visi dan misi Kabupaten Kepulauan Anambas 2021-2026.

Untuk lebih jelasnya mengenai Tujuan, Sasaran dan indikator Renstra-PD yang terkait dengan rumusan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, lokasi kegiatan dan kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) real tahun 2024 dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Anambas berdasarkan dialog kinerja dan pelaksanaan forum perangkat daerah adalah sebagaimana disajikan dalam Tabel 3.2 berikut.

Tabel 3.2
Program dan Kegiatan Tahun 2024

Tujuan	Sasaran	Indikator	Kode Rekening				Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Kerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4				7	8	9	10	11
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah yang Transparan Akuntabel dan Pelayanan yang berkualitas	Nilai SAKIP	8	1	1		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Penunjang urusan pemerintah daerah	KKA	100%	
		Indeks Kepuasan Masyarakat	8	1	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	KKA	100%	
			8	1	1	2.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1 Dokumen	15.000.000
			8	1	1	2.01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD		1 Dokumen	15.000.000
			8	1	1	2.01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 Dokumen	15.000.000
			8	1	1	2.01	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD		1 Dokumen	15.000.000
			8	1	1	2.01	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah DPA Perubahan -SKPD		1 Dokumen	15.000.000
			8	1	1	2.01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 Dokumen	15.000.000
			8	1	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan dan pelaporan administrasi keuangan		100%	
			8	1	1	2.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		18 Orang/Bulan	3.500.000.000
			8	1	1	2.02	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		25 Dokumen	122.500.000
			8	1	1	2.02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Dokumen	15.000.000
			8	1	1	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pengadministrasian Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		100%	
			8	1	1	2.03	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		1 Laporan	20.000.000
			8	1	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum		100%	

			8	1	1	2.0 6	0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		7 Paket	100.000.000
			8	1	1	2.0 6	0 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		12 Paket	50.000.000
			8	1	1	2.0 6	0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		12 Paket	50.000.000
			8	1	1	2.0 6	0 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		2 Paket	50.000.000
			8	1	1	2.0 6	0 6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		25 Laporan	143.584.000
			8	1	1	2.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan		100%	
			8	1	1	2.0 7	0 1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		2 Unit	64.479.360
			8	1	1	2.0 7	0 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		6 Unit	287.552.000
			8	1	1	2.0 7	0 9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1 Unit	197.183.300
			8	1	1	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100%	
			8	1	1	2.0 8	0 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 Laporan	9.300.000
			8	1	1	2.0 8	0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	17.450.000
			8	1	1	2.0 8	0 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		12 Laporan	18.400.000
			8	1	1	2.0 8	0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	600.000.000
			8	1	1	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarara dan prasarana perkantoran		100%	
			8	1	1	2.0 9	0 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		24 Unit	18.140.000
			8	1	2			Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Indeks kepuasan masyarakat di bidang Ideologi dan wawasan kebangsaan		76,75 (Baik)	
									Jumlah aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, dan kelompok		2 Peraturan	
									Jumlah kasus tindakan/pernyataan pejabat yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, dan kelompok		2 kasus	
									Jumlah kasus ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis, atau kelompok		2 kasus	
Mewujudkan stabilitas	Menurunnya jumlah kasus		8	1	2	2.0 1		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanapan Pelaksanaan Bidang	Terbentuknya Forum Pembauran Kebangsaan		Nihil	

politik dalam negeri dan kesatuan bangsa	pelanggaran demokrasi	Jumlah Kasus Pelanggaran Demokrasi						Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Terbentuknya gugus tugas GNRM Kabupaten Kepulauan Anambas		Nihil	
	Meningkatnya pemahaman aparat dan masyarakat tentang kesatuan bangsa, politik dan kewaspadaan dini	Jumlah aparat dan masyarakat yang memperoleh penguatan ideologi pancasila, wawasan kebangsaan, ketahanan nasional, pendidikan politik dan kewaspadaan dini							Jumlah laporan rutin Forum Pembauran Kebangsaan		2 kali	
									Jumlah laporan GNRM		3 laporan	
									Jumlah laporan SPJ dana hibah FPK		1 dokumen	
									Terlaksananya komunikasi dengan Forum Pembauran Kebangsaan		4 kali	
									Monitoring dan Evaluasi di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan		4 kali	
									Persentase fasilitasi dan mediasi kebangsaan yang terlayani		100%	
									Jumlah update data tokoh masyarakat dan tokoh adat		1 kali	
									Jumlah pendidikan/pelatihan bidang ideologi wawasan kebangsaan dan bela negara		2 kali	
									Jumlah rapat koordinasi Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		1 kali	
									Tersaluranya bantuan dana hibah Untuk Forum Pembauran Kebangsaan		1 kali	
									Jumlah kegiatan GNRM		2 kali	
			8	1	2	2.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun		5 Dokumen	50.000.000
			8	1	2	2.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun		1 Dokumen	673.600.000
			8	1	2	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		50 orang	150.000.000
			8	1	2	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan,	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran		30 Orang	150.000.000

								Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Bangsa	Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Bangsa			
			8	1	2	2.0 1	0 5	Pelaksanaan Monitoing Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Bangsa, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Bangsa, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Bangsa	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Bangsa, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Bangsa, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Bangsa		4 Laporan	50.000.000
			8	1	3			Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Tingkat Partisipasi Pemilu/Pilkada/Pilkades (Voters Turnout)		80%	
									Indeks kepuasan masyarakat dibidang poldagri		77,50 (BAIK)	
									Jumlah kasus ancaman/ penggunaan kekerasan oleh masyarakat/aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat		3 Kasus	
									Jumlah kasus hak memilih atau dipilih terhambat		NIHIL	
									Jumlah kasus kurang fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih		NIHIL	
									Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD		NIHIL	
									Kegiatan kaderisasi yang dilakukan partai peserta pemilu		2 Kegiatan	
									Persentase perempuan pengurus partai politik		20%	
									Jumlah partai politik aktif yang mendapatkan kursi		10 Partai	
			8	1	3	2.0 1		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik				
			8	1	3	2.0 1	0 3	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		200 Orang	19.000.000.000
			8	1	3	2.0 1	0 5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		4 Laporan	400.000.000

			8	1	4				Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Indeks kepuasan masyarakat dibidang ormas		78,00 (BAIK)	
										Jumlah kasus ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat/aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat		3 Kasus	
										Jumlah organisasi masyarakat yang terbukti melakukan pelanggaran hukum dan telah dijatuhi putusan yang berkekuatan hukum tetap		1 Ormas	
										Jumlah organisasi masyarakat yang kegiatannya mendukung program kerja pemerintah kabupaten kepulauan anambas		5 Ormas	
			8	1	4	2.01			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan				
			8	1	4	2.01	03		Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		30 Orang	50.000.000
			8	1	4	2.01	05		Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		6 Laporan	70.000.000
			8	1	5				Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Indeks kepuasan masyarakat dibidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama		76,85 (Baik)	
										Jumlah aturan tertulis yang membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama		1 aturan	
										Jumlah kasus tindakan/pernyataan pejabat membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama		1 kasus	
										Jumlah kasus ancaman/ penggunaan kekerasan dari satu kelompok terkait ajaran agama		1 kasus	
										Jumlah Pelajar/Masyarakat yang memperoleh pemahaman bahaya narkoba		245	
										Monitoring dan Evaluasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya		5 kali	
										Jumlah laporan di bidang ketahanan ekonomi sosial budaya dan agama		5 laporan	
										Jumlah koordinasi/ komunikasi dengan Forum Kerukunan Umat Beragama		6 kali	

										Jumlah tim/ forum/ gugus tugas yang terbentuk		Nihil	
										Jumlah kegiatan sosial budaya masyarakat		1 kali	
										Jumlah kegiatan RAN P4GN		1 kali	
			8	1	5	2.01			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Kebijakan/ Peraturan/ pedoman/ rekomendasi Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		2 kebijakan/p eraturan/ed aran	
										Terbentuknya Forum Kerukunan Umat Beragama		Nihil	
										Terbentuknya Tim RAN P4GN Kabupaten Kepulauan Anambas		Nihil	
										Jumlah laporan rutin RAN P4GN		2 laporan	
										Jumlah laporan rutin Forum Kerukunan Umat Beragama		2 laporan	
										Jumlah laporan SPJ dana hibah FKUB		1 dokumen	
										Terlaksananya komunikasi dengan Forum Kerukunan Umat Beragama		4 kali	
										Monitoring dan Evaluasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya		4 kali	
										Persentase fasilitasi dan mediasi keagamaan yang terlayani		100%	
										Terlaksananya update data tokoh agama dan rumah ibadah		1 kali	
										Jumlah agama yang terlibat dalam dialog antar umat beragama		4 agama	
										Jumlah rapat komunikasi dan koordinasi Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Agama		2 kali	
										Jumlah kegiatan RAN P4GN di Kepulauan Anambas		1 kali	
										Tersalurnya bantuan dana hibah Untuk Forum Kerukunan Umat Beragama		1 kali	
										Terselenggaranya kegiatan Sosial Budaya masyarakat		1 kali	
										Jumlah masyarakat yang terlibat langsung dalam kegiatan Sosial Budaya		50 orang	
			8	1	5	2.01	01		Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan		9 Dokumen	50.000.000
			8	1	5	2.01	02		Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial,	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi		1 Dokumen	100.000.000

								Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun			
			8	1	5	2.0 1	0 3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		29 Orang	49.000.000
			8	1	5	2.0 1	0 4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		31 orang	243.000.000
			8	1	5	2.0 1	0 5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		4 Laporan	25.000.000
			8	1	6			Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase penanganan gangguan keamanan dan potensi konflik sosial di daerah		85%	
			8	1	6	2.0 1		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	jumlah fasilitas pelaksanaan rapat koordinasi terkait kewaspadaan dini dan penanganan konflik di daerah		10 Rapat	
			8	1	6	2.0 1	0 1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun		2 Dokumen	22.740.000
			8	1	6	2.0 1	0 2	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun		2 Dokumen	39.609.000
			8	1	6	2.0 1	0 3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		20 Orang	50.000.000

			8	1	6	2.0 1	0 4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		20 Orang	39.608.000
			8	1	6	2.0 1	0 5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		365 Laporan Harian	31.773.000
			8	1	6	2.0 1	0 6	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota		2 Dokumen	1.000.000.000
Jumlah												Rp27.597.918. 660

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD

Rencana Kerja (RENJA) merupakan acuan setiap Perangkat Daerah (PD) dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi satu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

Penyusunan Rencana Kerja berpedoman pada RENSTRA Badan KESBANGPOL Kabupaten Kepulauan Anambas dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Penyusunan Renja merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD. Rencana Kerja yang disusun ini merupakan bagian yang utuh dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis Tahun 2021-2026.

Keduanya merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Menteri Dalam Negeri 2020-2024.

Adapun rumusan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan perkiraan maju tahun 2025 dapat disajikan dalam Tabel 4.1. berikut ini :

**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. KEPULAUAN ANAMBAS
TAHUN 2024**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						27.597.918.660,00							8.279.406.660,00	
	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM						27.597.918.660,00							8.279.406.660,00	
	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						27.597.918.660,00							8.279.406.660,00	
1.	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Urusan Pemerintahan terselesaikan	-			100 Persen	5.353.588.660,00						-	4.458.566.660,00	
	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	-			100 %	90.000.000,00			-	Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan, Stabilitas Sosial, Keamanan dan Ketertiban di Masyarakat	-	-	42.530.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan, Stabilitas Sosial, Keamanan dan Ketertiban di Masyarakat	-		2.530.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan, Stabilitas Sosial, Keamanan dan Ketertiban di Masyarakat	-		20.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Stabilitas Sosial, Keamanan dan Ketertiban di Masyarakat	-		15.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.01.0004		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Stabilitas Sosial, Keamanan dan Ketertiban di Masyarakat	-		1.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.01.0005		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Stabilitas Sosial, Keamanan dan Ketertiban di Masyarakat	-		1.750.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.01.0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	15.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Stabilitas Sosial, Keamanan dan Ketertiban di Masyarakat	-		1.750.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan dan pelaporan administrasi keuangan	-			100 %	3.637.500.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Stabilitas Sosial, Keamanan dan Ketertiban di Masyarakat	-	-	3.289.260.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				18 Orang/bulan	3.500.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan, Stabilitas Sosial, Keamanan dan Keterliban di Masyarakat	-		3.163.920.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				25 Dokumen	122.500.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan, Stabilitas Sosial, Keamanan dan Keterliban di Masyarakat	-		122.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	15.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan, Stabilitas Sosial, Keamanan dan Keterliban di Masyarakat	-		2.840.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pengadaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan	-			100 %	20.000.000,00			-	Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan, Stabilitas Sosial, Keamanan dan Keterliban di Masyarakat	-	-	15.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	20.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan, Stabilitas Sosial, Keamanan dan Ketertiban di Masyarakat	-		15.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum	-			100 Persen	393.584.000,00			-	Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan, Stabilitas Sosial, Keamanan dan Ketertiban di Masyarakat	-	-	280.544.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				7 Paket	100.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan, Stabilitas Sosial, Keamanan dan Ketertiban di Masyarakat	-		34.600.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	50.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan, Stabilitas Sosial, Keamanan dan Ketertiban di Masyarakat	-		2.710.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	50.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan, Stabilitas Sosial, Keamanan dan Ketertiban di Masyarakat	-		32.250.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	50.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan, Stabilitas Sosial, Keamanan dan Ketertiban di Masyarakat	-		17.400.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				25 Laporan	143.584.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan, Stabilitas Sosial, Keamanan dan Ketertiban di Masyarakat	-		193.584.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan sarana dan prasama sesuai kebutuhan	-			100 Persen	549.214.660,00			-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan, Stabilitas Sosial, Keamanan dan Ketertiban di Masyarakat	-	-	316.662.660,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2 Unit	64.479.360,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan, Stabilitas Sosial, Keamanan dan Keterliban di Masyarakat	-		64.479.360,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	287.552.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan, Stabilitas Sosial, Keamanan dan Keterliban di Masyarakat	-		55.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	197.183.300,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan, Stabilitas Sosial, Keamanan dan Keterliban di Masyarakat	-		197.183.300,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	-			100 %	645.150.000,00			-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan, Stabilitas Sosial, Keamanan dan Ketertiban di Masyarakat	-	-	496.430.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	9.300.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan, Stabilitas Sosial, Keamanan dan Ketertiban di Masyarakat	-		9.300.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	17.450.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan, Stabilitas Sosial, Keamanan dan Ketertiban di Masyarakat	-		17.450.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	18.400.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan, Stabilitas Sosial, Keamanan dan Keterliban di Masyarakat	-		18.400.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	600.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan, Stabilitas Sosial, Keamanan dan Keterliban di Masyarakat	-		451.280.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarara dan prasarana perkantoran	-			100 %	18.140.000,00			-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan, Stabilitas Sosial, Keamanan dan Keterliban di Masyarakat	-	-	18.140.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				24 Unit	18.140.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Stabilitas Sosial, Keamanan dan Ketertiban di Masyarakat	-		18.140.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2.	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	indeks kepuasan masyarakat bidang Ideologi dan wawasan kebangsaan	-			76,85 Persen	1.073.600.000,00						-	1.053.000.000,00	
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah monitoring dan evaluasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, dan Pembauran Kebangsaan Jumlah pelajar yang memperoleh pendidikan/ pemahaman Bela Negara Terbentuknya pengurus Forum Pembauran Kebangsaan Terbentuknya Tim GNRM Kabupaten Kepulauan Anambas Terlaksananya kegiatan GNRM Terlaksananya kegiatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan Terlaksananya rapat koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan Tersalurinya bantuan dana hibah Untuk Forum Pembauran Kebangsaan	-			4 Kali 50 Orang 0 Forum 0 Tim 2 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali	1.073.600.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Stabilitas Sosial, Keamanan dan Ketertiban di Masyarakat	-	-	1.053.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan														
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun				5 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Stabilitas Sosial, Keamanan dan Ketertiban di Masyarakat	-		30.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun				1 Dokumen	673.600.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Stabilitas Sosial, Keamanan dan Ketertiban di Masyarakat	-		773.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				50 Orang	150.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Stabilitas Sosial, Keamanan dan Ketertiban di Masyarakat	-		250.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				30 Orang	150.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Stabilitas Sosial, Keamanan dan Ketertiban di Masyarakat	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan														
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				4 Laporan	50.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Stabilitas Sosial, Keamanan dan Ketertiban di Masyarakat	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	<i>rata-rata tingkat partisipasi pemilih pada pemilu dan pilkada</i>	-			85,5 Persen	19.400.000.000,00						-	1.027.750.000,00	
	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	<i>Jumlah Masyarakat yang memperoleh penguatan pendidikan politik Jumlah partai politik yang mendapatkan bantuan dana hibah Jumlah Pemilih Muda yang memperoleh penguatan pendidikan politik Jumlah pengurus parpol yang memperoleh penguatan pendidikan politik Jumlah Perempuan yang memperoleh penguatan pendidikan politik Jumlah rapat komunikasi dan koordinasi Partai Politik dan Pemerintah Daerah Terlaksananya rapat koordinasi penguatan ideologi pancasila, wawasan kebangsaan dan pendidikan politik</i>	-			60 Orang 10 Partai 60 Orang 20 Orang 60 Orang 1 Rapat 4 Rapat	19.400.000.000,00			-	Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan, Stabilitas Sosial, Keamanan dan Ketertiban di Masyarakat	-	-	1.027.750.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.03.2.01.0003		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</i>				200 Orang	19.000.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan, Stabilitas Sosial, Keamanan dan Ketertiban di Masyarakat	-		800.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.03.2.01.0005		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</i>				4 Laporan	400.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan, Stabilitas Sosial, Keamanan dan Ketertiban di Masyarakat	-		227.750.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	indeks kepuasan masyarakat bidang organisasi masyarakat	-			78 Persen	120.000.000,00						-	90.090.000,00	
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah ormas yang mendapatkan bantuan dana hibah Jumlah pengurus ormas yang memperoleh penguatan ideologi pancasila, wawasan kebangsaan dan pendidikan politik Terbentuknya tim terpadu pengawasan ormas kabupaten kepulauan anambas Terlaksananya monitoring perkembangan ormas di Kecamatan Terlaksananya rapat koordinasi dan evaluasi tim terpadu pengawasan ormas kabupaten kepulauan anambas	-			6 Ormas 30 Orang 1 Tim 6 Kecamatan 8 Rapat	120.000.000,00			-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan, Stabilitas Sosial, Keamanan dan Ketertiban di Masyarakat	-	-	90.090.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				30 Orang	50.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan, Stabilitas Sosial, Keamanan dan Ketertiban di Masyarakat	-		50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				6 Laporan	70.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan, Stabilitas Sosial, Keamanan dan Ketertiban di Masyarakat	-		40.090.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5.	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	indeks kepuasan masyarakat bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	-			76,85 Persen	467.000.000,00						-	400.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Kebijakan/ Peraturan/ pedoman/ rekomendasi Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Jumlah monitoring dan evaluasi di bidang ketahanan ekonomi sosial budaya Terbentuknya pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Terlaksananya dialog antar umat beragama Terlaksananya kegiatan RAN P4GN Terlaksananya rapat koordinasi Forum Kerukunan Umat Beragama Tersalurinya bantuan dana hibah Untuk Forum Kerukunan Umat Beragama Terseleenggaranya kegiatan Sosial Budaya masyarakat	-			2 kebijakan/p eraturan/edar an 4 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali	467.000.000,00			-	Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan, Stabilitas Sosial, Keamanan dan Keterliban di Masyarakat	-	-	400.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.05.2.01.0001		Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah														
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun				9 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan, Stabilitas Sosial, Keamanan dan Keterliban di Masyarakat	-		250.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.05.2.01.0002		Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah														
			Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	-	-	Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan, Stabilitas Sosial, Keamanan dan Keterliban di Masyarakat	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.05.2.01.0003		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				29 Orang	49.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Stabilitas Sosial, Keamanan dan Ketertiban di Masyarakat	-		150.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				31 Orang	243.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Stabilitas Sosial, Keamanan dan Ketertiban di Masyarakat	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				4 Laporan	25.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Stabilitas Sosial, Keamanan dan Ketertiban di Masyarakat	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
6.	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	persentase isu kewaspadaan/ konflik sosial yg berhasil ditangani	-			80 Persen	1.183.730.000,00						-	1.250.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	- Jumlah fasilitasi pelak sanaan rapat koordinasi terkait kewaspadaan dini dan penanganan konflik di daerah	-			1 Kegiatan 10 Kali	1.183.730.000,00			-	Pembangu nan Manusia yang berkualitas, Unggul dan Berbudaya Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan, Stabilitas Sosial, Keamanan dan Ketertiban di Masyarakat	-	-	1.250.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.06.2.01.0001		Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah														
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun				2 Dokumen	22.740.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang berkualitas, Unggul dan Berbudaya Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan, Stabilitas Sosial, Keamanan dan Ketertiban di Masyarakat	-		60.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.06.2.01.0002		Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah														
			Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun				2 Dokumen	39.609.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Manusia yang berkualitas, Unggul dan Berbudaya Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan, Stabilitas Sosial, Keamanan dan Ketertiban di Masyarakat	-		90.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.06.2.01.0003		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				20 Orang	50.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Stabilitas Sosial, Keamanan dan Ketertiban di Masyarakat	-		300.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				20 Orang	39.608.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Stabilitas Sosial, Keamanan dan Ketertiban di Masyarakat	-		100.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				365 Laporan	31.773.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Berbudaya Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Stabilitas Sosial, Keamanan dan Ketertiban di Masyarakat	-		100.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				2 Dokumen	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Anambas, Siantan, Terempa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Stabilitas Sosial, Keamanan dan Ketertiban di Masyarakat	-		600.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			JUMLAH					27.597.918.660,00							8.279.406.660,00	

BAB V

PENUTUP

Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik disusun dalam rangka menjawab isu-isu pelaksanaan tugas dan fungsi serta menunjang visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dengan mengacu RKPD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024.

Rancangan Akhir Rencana Kerja juga disusun sebagai upaya menggambarkan program dan kegiatan prioritas tahun 2024 serta kebutuhan pendanaan real dalam rangka mensukseskan pelaksanaan pemilihan umum serentak merupakan tujuan dan sasaran jangka pendek dalam menjalankan urusan Pemerintahan Umum di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja dijabarkan program dan kegiatan serta porsi anggaran yang diberikan dan pada bab selanjutnya disajikan kebutuhan anggaran real sangat penting untuk pelaksanaan kegiatan tahun 2024 dalam rangka mendukung serta mensukseskan pemilihan umum serentak tahun 2024.

Demikian Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 dan ucapan terima kasih atas bantuan dan dukungan seluruh aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam merumuskan program dan kegiatan tahun 2024, semoga dapat menjadi salah satu dokumen yang bermanfaat.

Tarempa, 17 Juli 2023

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

